

## **BAB IV**

### **ANALISA SITUASI ANAK KABUPATEN REMBANG**

Kabupaten Rembang telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak pada Tahun 2009. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Rembang Layak Anak, sudah banyak langkah-langkah yang telah dilaksanakan, antara lain sudah terdapat Gugus Tugas KLA, ada Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis pelaksanaan KLA.

Walaupun telah dilaksanakan langkah-langkah dalam mencapai Kabupaten Rembang Layak Anak, tetapi masih banyak kendala yang menjadikan pencapaian Kabupaten Rembang Layak Anak belum bisa tercapai secara maksimal. Berikut adalah analisa situasi pada masing-masing klaster Kabupaten Layak Anak:

#### **4.1. Penguatan Kelembagaan**

Berbagai permasalahan yang terjadi pada penguatan kelembagaan antara lain:

1. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum sepenuhnya dipahami oleh SKPD, Pemerintah Kecamatan dan desa.

Perda Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah disahkan pada Tahun 2014, tetapi pada implementasinya, SKPD, Kecamatan dan Desa belum sepenuhnya mengetahui maupun memahami isi Perda serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai Perda tersebut. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Perda Tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi Perda oleh Bagian Hukum dan BPMPKB Kab. Rembang ke seluruh Kecamatan se-Kabupaten Rembang dengan peserta seluruh Kepala Desa, akan tetapi hasilnya masih kurang maksimal karena kurangnya komitmen dari aparatur kecamatan maupun desa. Kades yang mengikuti sosialisasi kurang menyampaikan hasil sosialisasi kepada perangkat yang lain dan kepada masyarakat.

2. Kelembagaan gugus tugas KLA belum berjalan efektif

Gugus Tugas KLA setiap tahun melaksanakan koordinasi dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi setiap semester, tetapi kegiatan tersebut tidak bisa efektif dan masih ada SKPD anggota gugus tugas KLA yang belum mengerti tentang KLA, bahkan menilai bahwa KLA tidak ada kaitannya dengan tupoksi dalam SKPD. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya koordinasi internal SKPD anggota gugus tugas KLA, Kepala SKPD tidak pernah diberikan advokasi tentang Perlindungan Anak maupun KLA, oleh karena itu Kepala SKPD tidak mempunyai komitmen untuk mewujudkan KLA.

Rakor yang diadakan Bappeda Kab. Rembang maupun BPMPKB Kab. Rembang sering tidak maksimal karena personil yang mengikuti sering berganti-ganti, sehingga beberapa peserta belum memahami KLA. Rakor oleh Bappeda Kab. Rembang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, tetapi masih kurang maksimal, seharusnya dilakukan setiap triwulan, agar advokasi kepada SKPD lebih optimal. Kurangnya kuantitas pelaksanaan rakor dikarenakan keterbatasan anggaran dalam APBD kabupaten Rembang. Penyebab lain, kurangnya pemahaman SKPD anggota gugus tugas KLA juga bisa disebabkan karena agenda rapat tidak menarik, sehingga peserta rapat tidak antusias untuk mengikuti dan aktif dalam rapat.

3. Belum Efektifnya Surat Edaran tentang Anggaran operasional Gugus Tugas KLA dan KPAD

Surat Edaran tentang Anggaran operasional Gugus Tugas KLA dan KPAD sudah ada, namun dalam pelaksanaannya, SE tersebut tidak diindahkan oleh SKPD, Kecamatan maupun desa. Kondisi ini disebabkan selain karena selain karena sosialisasi tentang pemenuhan hak partisipasi anak belum dipahami oleh seluruh aparat pemerintahan, selain itu anggaran untuk pengarusutamaan hak anak (PUHA) juga belum optimal sehingga mempengaruhi SDM yang menangani KLA juga belum maksimal.

4. Belum optimalnya peran masyarakat dan media dalam mendukung KLA

Peran masyarakat dan media terpengaruh oleh peran pemerintah. Peran masyarakat belum optimal dikarenakan sebagian besar

masyarakat belum mengetahui KLA, sosialisasi yang dilakukan baru sampai kepada kepala desa dan sebagian besar kepala desa belum meneruskan informasi KLA kepada perangkat desa dan masyarakat. Begitu pula media, kegiatan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan belum bermitra dengan media, sehingga banyak informasi mengenai KLA hanya diketahui terbatas oleh masyarakat.

5. Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam KLA (Kebijakan perlindungan anak, produk aman bagi anak dan forum CSR)

Di Kabupaten Rembang terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai CSR, dan selama ini CSR dari beberapa perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan bantuan kepada warga miskin belum dikoordinasi dengan baik, sehingga CSR perusahaan tersebut melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri. CSR belum pernah secara khusus memberikan perhatian kepada anak-anak, dikarenakan regulasi yang mengatur CSR belum ada.

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa permasalahan pada penguatan kelembagaan KLA, akar permasalahan yang mendasari adalah karena kurangnya komitmen dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun SKPD. Untuk bergerak bersama-sama, bersinergi secara masif dan berkelanjutan.

#### **4.2. Hak Sipil dan Kebebasan**

Dalam klaster hak sipil dan kebebasan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan indikator KLA klaster ini belum tercapai, antara lain sebagai berikut:

1. Belum meluasnya informasi KLA

Penyediaan informasi tentang KLA sangat penting agar masyarakat luas mengetahui perkembangan pemenuhan hak anak di Kabupaten Rembang baik dari media cetak, elektronik radio maupun papan informasi di tempat-tempat strategis. Permasalahan yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan SDM namun dalam mengatasi hal ini telah dirintis kemitraan dengan Lembaga Perlindungan Anak Rembang (LPAR). Hal yang sudah baik dan perlu upaya agar terus dikembangkan adalah peran aktif LPAR. Mereka merupakan

kepanjangan tangan pemkab/gugus tugas KLA dalam mengadvokasi seluruh desa di Kabupaten Rembang untuk implementasi desa ramah anak.

Kondisi di Kabupaten Rembang, tempat-tempat strategis yang dapat diakses oleh masyarakat belum tersedia informasi mengenai hak anak dan KLA. KLA baru dipahami hanya oleh golongan terbatas, masyarakat khususnya perdesaan belum mengetahui KLA dan cara mewujudkan KLA. Media di Kabupaten Rembang seperti radio, media cetak/koran belum mempunyai peran dalam publikasi hak anak dan KLA, hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten belum pernah bekerja sama/ menghimbau kepada media untuk mendukung KLA secara aktif dan regulasi yang mengatur juga belum ada. Selain media lokal, semua stakeholder di Kabupaten Rembang belum melakukan publikasi tentang hak anak dan KLA secara maksimal. Gugus tugas KLA yang seharusnya mempunyai peran dalam kerjasama dengan media maupun stakeholder masih kurang aktif dalam melakukan kerjasama.

2. Masih rendahnya minat dan motivasi baca anak-anak

Informasi yang baik untuk anak-anak berpengaruh pada pola pikir anak, menjadikan anak berwawasan luas sehingga daya imajinasi anak yang tinggi menyebabkan kreatifitas dan inovasi untuk anak. Informasi tersebut bisa didapat dari buku bacaan yang erat kaitannya dengan perpustakaan, sehingga ketersediaan perpustakaan berpengaruh pada minat baca anak-anak. Adapun perpustakaan disekolah kurang diminati oleh anak-anak karena tempat membaca kurang menarik, penataan ruang perpustakaan yang kurang menarik menyebabkan anak tidak tertarik untuk beraktifitas/ membaca di perpustakaan.

Selain penataan tempat membaca yang kurang menarik, jenis dan jumlah bacaan buku yang kurang variatif juga bisa menyebabkan kurangnya ketertarikan anak-anak untuk membaca, buku sudah lama dan belum ada penambahan buku yang baru.

Minat membaca anak yang sangat kurang seharusnya disikapi oleh keluarga maupun guru serta Pemerintah kabupaten untuk mencari solusi bagaimana menumbuhkan minat membaca anak, bahkan

untuk memaksa anak agar mau membaca. Sampai dengan sekarang masih sedikit event gerakan gemar membaca diluar sekolah serta event khusus untuk gemar membaca untuk anak. SKPD teknis yakni Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebenarnya sudah mempunyai kegiatan untuk penumbuhan minat baca anak melalui perpustakaan keliling di kecamatan, event *car free day* dan pameran buku. Pada perkembangan keterbukaan informasi melalui media elektronik menyebabkan banyak bermunculan aplikasi game dan internet yang mudah untuk diakses, anak-anak cenderung lebih menyukai permainan hp daripada membaca buku.

3. Belum semua desa memiliki lembaga KPAD

Perda Perlindungan anak sudah jelas mengamanatkan desa agar memenuhi hak anak dengan menyelenggarakan desa ramah anak, salah satunya untuk membentuk lembaga perlindungan anak di semua desa (KPAD), tetapi sampai dengan tahun 2015, belum semua desa memiliki KPAD, hal ini disebabkan karena belum semua Kepala Desa memahami isi dari Perda tersebut. Desa yang telah memiliki KPAD pun juga belum berjalan dengan maksimal, karena masih bingung akan melakukan kegiatan (KPAD tidak aktif).

KLA telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2009, akan tetapi lokus kegiatan hanya pada 30 (tiga puluh) desa percontohan DRA. Implementasi pengembangan di desa lain, kebijakan KLA yang berbasis DRA merupakan hal yang baru, sehingga dibutuhkan komitmen yang tinggi dan secara terus menerus untuk melakukan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kegiatan agar mendukung terwujudnya KLA di semua desa. Meskipun telah ada Perda Perlindungan anak, namun pada level Pemerintah Desa masih juga mengalami kesulitan, karena belum ada petunjuk teknis pembentukan KPAD maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan KPAD serta yang mengatur struktur organisasi dan tupoksi pengurus KPAD.

4. Belum tersedianya mekanisme pelayanan/ penanganan anak terlantar di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang terletak di jalan pantai utara timur jawa Tengah menyebabkan sering ada pengemis, gelandangan dan orang

terlantar (PGOT), anak terlantar, anak punk dll. Banyaknya kasus anak terlantar tersebut belum menjadikan SKPD teknis membuat program kerja yang terencana dan berkelanjutan untuk menangani masalah PGOT dalam bentuk SOP. Sebagai contoh penanganan anak punk yang telah dirazia tidak ditindaklanjuti dengan intervensi kegiatan apapun. Belum adanya tempat khusus untuk penanganan anak terlantar (shelter) juga menjadi penyebab penanganan masalah anak menjadi kurang maksimal.

SKPD yang menangani anak terlantar berada di Dinsosnakertrans, Satpol PP, BPMPKB, Dindukcapil seharusnya saling berkoordinasi apabila terdapat kasus anak terlantar. Sebagai contoh apabila terdapat anak yang kedua orang tuanya telah meninggal, SKPD BPMPKB harus berkoordinasi dengan Dindukcapil untuk menentukan kewajiban pengasuhan anak tersebut, contoh kasus lain yakni anak punk yang transit di Rembang dan meresahkan masyarakat, maka Satpol PP, BPMPKB dan Dinsosnakertrans harus bersinergi untuk menangani dan mencari solusi terbaik. Penanganan masalah untuk mewujudkan KLA tidak boleh parsial, harus terintegrasi dengan melibatkan SKPD terkait. Anggapan bahwa penanganan masalah terkait KLA bukan merupakan tupoksi SKPD secara terintegrasi, mindset seperti ini harus diubah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang jelas yang diwadahi dalam RAD KLA ini.

Kesimpulan akar masalah yang dapat diambil dalam permasalahan yang terjadi pada Klaster hak sipil dan kebebasan adalah sebagai berikut:

- a) Gugus Tugas belum proaktif dalam mewujudkan KLA
- b) Masih terbatasnya pemahaman keluarga dan lembaga dalam menumbuhkan peran aktif keluarga
- c) Perencanaan di SKPD belum berbasis indikator KLA
- d) Sosialisasi Perda Perlindungan Anak belum efektif menjangkau semua elemen masyarakat dan stakeholder
- e) SKPD teknis belum mempunyai program kerja yang terencana dan berkelanjutan dalam Kabupaten Rembang Layak Anak

- f) Kurangnya komitmen kepala SKPD untuk mewujudkan KLA

#### **4.3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Permasalahan yang terjadi pada Klaster ini antara lain sebagai berikut:

1. Angka pernikahan anak dibawah 18 tahun masih tinggi, yaitu sebanyak 1.256 kasus

Permasalahan pernikahan anak masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi, usaha Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengurangi kasus pernikahan anak sudah banyak. Angka kasus dari waktu ke waktu mengalami penurunan, tetapi angka pernikahan anak di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi.

Tingginya kasus pernikahan anak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Pernikahan anak disebabkan karena hamil diluar nikah

Pergaulan remaja yang semakin bebas, dipicu oleh perkembangan keterbukaan informasi melalui media internet menyebabkan anak dengan mudah mengakses sesuatu yang negatif, misalnya situs pornografi. Adanya Internet, anak dengan mudah berhubungan dengan lawan jenis dengan melalui media sosial, sedangkan orang tua tidak bisa memantau aktifitas media sosial anak karena keterbatasan kemampuan orang tua dalam menggunakan gadget, hal tersebut mengakibatkan anak menjadi tidak terpantau dengan baik.

Selain itu, dalam pendidikan formal di sekoah, anak tidak diawasi dan diberi perhatian lebih dalam hal pergaulannya di sekolah. Pemberian pengetahuan masalah kesehatan reproduksi remaja sangat kurang, begitu pula di rumah, orang tua belum bisa menjadi teman komunikasi anak terkait masalah kesehatan reproduksi anak karena kesibukan mencari ekonomi dan pengetahuan yang terbatas. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang reproduksi remaja menyebabkan ketidakpedulian orang tua tentang pergaulan

anak, orang tua juga tidak mengetahui perkembangan mental maupun psikologi anak.

b) Kurangnya pengawasan orang tua

Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan pergaulan anak, namun lingkungan keluarga saja yang baik tidak dapat menjamin bahwa anak tidak akan terpengaruh kondisi lingkungannya. Lingkungan inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu pengawasan orang tua sangat penting untuk memantau pergaulan anak terkait siapa teman anaknya, dimana mereka bergaul dan hal apa yang dilakukan anak bersama dengan temannya diluar rumah. Orang tua harus tahu dan mengawasi kegiatan yang dilakukan anak selalu positif dan tidak melakukan hal-hal menuju perbuatan kriminal atau asusila.

c) Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja oleh anak masih kurang;

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi anak sangat penting bagi anak. Hal ini akan memberikan gambaran tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana menyikapi permasalahan kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi anak dikarenakan anak tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja bagi anak. Sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi baik disekolah maupun diluar sekolah. PIK KRR yang sudah terbentuk agar selalu aktif sebagai wadah konsultasi bagi remaja. PIK KRR yang sudah terbentuk perlu digiatkan kembali agar mempunyai kegiatan inovatif yang menarik minat anak sehingga anak-anak bersemangat ikut aktif dalam keanggotaan PIK KRR tersebut. Layanan kesehatan reproduksi anak masih sangat perlu.

d) Kejahatan seksual oleh/ kepada anak

Pendidikan kesehatan reproduksi anak yang masih sangat minim, dimungkinkan berdampak pada kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Kejadian penjualan anak yang

disebut *human trafficking* masih terjadi di beberapa daerah. Contoh kasus remaja dari luar Rembang yang dijanjikan bekerja ternyata bekerja sebagai penyaji kopi (PK) di warung kopi di Rembang.

Remaja yang salah pergaulan dan terjebak pada kehidupan seks bebas akan cenderung sulit untuk kembali pada kehidupan normal. Gaya hidup dari keinginan hidup sejahtera dengan cara instan akan menjadikan remaja tersebut menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya.

- e) Adanya keinginan orang tua untuk menikahkan anak;

Budaya lokal bahwa orang tua yang memiliki anak perempuan mempunyai kecenderungan ingin segera menikahkan anaknya, terlebih masyarakat desa tingkat kemiskinan tinggi. Seringkali orang tua beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi dan takut kesulitan mempunyai suami bila menolak lamaran (perawan tua).

Orang tua yang masih memiliki pemikiran seperti itu biasanya tidak mempunyai pendidikan tinggi, mereka berharap anaknya dinikahkan dengan orang yang lebih mapan supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Apabila dinikahkan dengan orang yang miskin, paling tidak bisa mengurangi beban pengeluaran orang tua karena beban pengeluarannya beralih menjadi beban suaminya. Hal tersebut akan menjadikan kemiskinan orang tua tidak bisa terputus karena anak tersebut juga akan menjadi miskin, karena dengan pendidikan rendah dan usia yang belum cukup matang, anak belum bisa mandiri dan rumah tangga cenderung akan terjadi banyak masalah.

2. LK3 dan LKSA (panti asuhan) belum efektif

Di Kabupaten Rembang telah ada lembaga kesejahteraan keluarga maupun kesejahteraan sosial anak, akan tetapi lembaga tersebut belum optimal melayani masyarakat, belum ada kegiatan yang efektif untuk pengasuhan anak. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh:

- a) Belum ada kebijakan perlindungan anak di LK3

Lembaga kesejahteraan keluarga yang telah ada di kabupaten Rembang belum optimal mengupayakan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, kepentingan anak belum diakomodir sehingga adanya lembaga ini belum menjawab tantangan pengasuhan anak yang lebih baik dan terorganisir oleh lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

b) Sumber Daya Manusia di LK3 dan LKSA masih kurang  
Sangat disayangkan, lembaga kesejahteraan keluarga yang terbentuk tidak mempunyai aktifitas dan SDM yang mencukupi, hal tersebut dikarenakan belum ada rekrutmen petugas pengelola LK3 dan LKSA serta belum ada pelatihan untuk mengelola LK3 dan LKSA.

c) Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di LK3 dan LKSA

Sangat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan diatas, LK3 dan LKSA yang tidak aktif disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Lembaga yang telah terbentuk tidak dapat berjalan bila tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut dikarenakan belum ada penganggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, serta belum dimasukkan dalam program. Kepala SKPD yang menangani belum ada komitmen untuk memfasilitasi LK3 dan LKSA lebih baik.

3. Belum adanya pemahaman tentang perlindungan anak (hak anak) oleh pengelola LK3 dan LKSA

Lembaga LK3 dan LKSA yang belum mengetahui tentang perlindungan anak dikarenakan perlindungan anak bukan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam lembaga tersebut.

Selain itu, pengelola panti asuhan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kesimpulan akar permasalahan yang terjadi dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif antara lain:

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam perlindungan anak;
- Kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak;
- Belum adanya komunikasi antar sektor dalam menyusun program-program LK3 dan LKSA
- Fasilitasi LK3 dan LKSA belum dimasukkan dalam program kerja di SKPD

#### **4.4. Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan dasar**

Masih banyak permasalahan yang terjadi pada Klaster ini, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi

Angka kematian bayi di Kabupaten Rembang masih tinggi karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

###### a) BBLR (berat bayi lahir rendah)

Kejadian BBLR yang masih tinggi jika dianalisis penyebabnya bisa dikarenakan oleh banyak hal, antara lain anemia yang terjadi pada ibu hamil, gizi kurang maupun kehamilan yang belum cukup bulan untuk melahirkan serta adanya penyakit penyerta pada ibu hamil. Beberapa penyebab BBLR diatas bisa dikarenakan kesadaran ibu hamil masih rendah. Kesadaran yang rendah disebabkan pendidikan rendah, pengetahuan tentang kehamilan rendah, bisa juga disebabkan perekonomian keluarga yang rendah. Masyarakat miskin belum mempunyai pemikiran untuk menjaga kesehatan/ meningkatkan gizi ibu hamil.

###### b) Terjadi kasus asfeksia

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Asfiksia bisa terjadi karena proses persalinan yang memakan waktu lama, pelayanan persalinan yang kurang berkualitas serta tenaga kesehatan yang kurang berkompeten. Ketiga penyebab diatas bisa terjadi dikarenakan lama atau terlambatnya mengambil keputusan dalam penanganan, pemberian rujukan dan pemberian tindakan juga terlambat. Ketepatan waktu

penanganan persalinan sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu tindakan cepat dan tepat harus bisa diupayakan. Keterlambatan penanganan persalinan dikarenakan keluarga ibu hamil mengalami kepanikan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Keluarga ibu hamil seharusnya mempunyai perencanaan dan persiapan persalinan yang matang, sehingga pada saat persalinan tiba, keluarga sudah siap menjalani persalinan tanpa timbul rasa kepanikan.

Keterlambatan juga bisa disebabkan petugas kesehatan yang kurang cepat dalam menangani administrasi, dll. Jarak rumah ke tempat persalinan juga bisa menghambat proses persalinan, terlebih alat transportasi yang akan digunakan belum siap, serta ibu hamil tidak mempunyai biaya persalinan.

c) Terjadi kelainan konginetal

Kelainan konginetal atau cacat bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non genetik. Kelainan tersebut bisa terjadi karena anemia pada ibu hamil, sering terpapar asap rokok dan torch. Bisa juga terjadi karena lingkungan yang tidak sehat serta gizi yang kurang, penyebab tersebut lalu mengarah pada permasalahan kemiskinan sehingga menjadikan masyarakat kurang pendidikan dan memiliki kecenderungan kesadaran akan kesehatan lingkungan yang rendah.

d) Terjadi infeksi pada persalinan

Persalinan bukan hanya memerlukan kecepatan penanganan, tetapi juga ketepatan dan ketelitian oleh tenaga kesehatan, apabila terjadi infeksi, maka keselamatan ibu dan bayibisa terancam. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pertolongan tenaga kesehatan tidak sesuai, alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan tidak steril dan kompetensi tenaga kesehatan kurang.

Hal tersebut bisa dihindari apabila standar operasional persalinan dilaksanakan dengan baik. AKB tinggi, SKPD yang menangani (Dinas Kesehatan) perlu untuk melakukan evaluasi SOP yang sudah ada untuk mencegah kasus kematian bayi dan perlu mengadakan pelatihan operator medis secara berkala.

## 2. Gizi buruk dan kurang serta stunting masih tinggi

Permasalahan gizi buruk/ kurang serta stunting yang masih tinggi diakibatkan oleh beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

### a) Pola pemberian makan salah

Hal tersebut bisa terjadi karena pola pengasuhan dari orang tua/ keluarga salah, yang masih sering terjadi yakni gizi makanan rendah, konsumsi sayur dan ikan tidak tinggi. Kesalahan pada pengasuhan bisa disebabkan karena kesadaran masyarakat yang rendah serta pemahaman akan pentingnya pola pemberian makanan sehat sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa makanan sehat adalah makanan yang mahal dan hanya bisa disajikan oleh kalangan masyarakat ekonomi tinggi, padahal makanan sehat bisa diambil dari lingkungan sekitar.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola makanan sehat secara umum karena budaya turun temurun yang dipercaya kebenarannya tetapi sebenarnya budaya tersebut salah, misalnya: pemberian makanan tambahan bayi, seharusnya diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, dan selama 0-6 bulan bayi hanya memerlukan asi, tetapi di lingkungan

### b) Adanya penyakit penyerta

Penyakit yang sering terjadi bersamaan dengan gizi buruk/ kurang biasanya terkait dengan kesehatan lingkungan, misal diare, DB, malaria, muntaber, dll. Rendahnya kesehatan lingkungan bisa disebabkan PHBS yang masih rendah serta kesadaran masyarakat untuk PHBS juga rendah. Disamping

itu, ada permasalahan lain yaitu tenaga kesehatan di desa belum mencukupi, belum semua desa terdapat bidan desa, beberapa bidan desa juga tidak menetap diwilayah kerja.

- c) Masih ada mitos/ budaya masyarakat yang salah terkait makanan bergizi

Pada beberapa desa masih terdapat masyarakat yang berpikir bahwa mengkonsumsi ikan akan menyebabkan balita muntah dan alergi, hal ini yang menyebabkan anak sampai dewasa tidak gemar makan ikan. Mitos yang sudah turun temurun dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih terbelakang. Masyarakat yang kurang pemahamannya tersebut merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak mau menerima masukan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, bisa juga pendekatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan kurang tepat.

- d) Belum optimalnya PHBS

Capaian ODF/ Stop BABS Kabupaten Rembang yang masih rendah tidak hanya didasarkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk membangun jamban sehat, tetapi kesadaran masyarakat yang kurang, mereka cenderung memilih BAB sembarangan karena kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Masyarakat tidak mengetahui arti penting PHBS. Sebagian masyarakat juga belum mendapatkan sosialisasi tentang PHBS, sosialisasi hanya dilaksanakan baru sebatas kepada kepala desa dan perangkat desa.

#### **4.5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya**

Masalah yang terjadi dalam klaster pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. PAUD usia 0-2 tahun belum terlayani

Usia 0-6 tahun merupakan usia emas dalam tumbuh kembang anak, yang seharusnya diisi dengan kegiatan bermain tapi dengan muatan pendidikan, hal tersebut bisa didapatkan pada

lembaga PAUD, tetapi anak usia 0-2 tahun belum terlayani secara optimal, hal ini disebabkan oleh:

a) Terbatasnya kelembagaan TPA (Tempat Penitipan Anak)

Di Kabupaten Rembang masih sedikit lembaga yang menyediakan tempat penitipan anak, walaupun ada hanya yang dikelola oleh swasta dan hanya di daerah kota Rembang. TPA disediakan oleh swasta menjadikan biaya bulanan menjadi besar, sehingga masyarakat menengah kebawah belum bisa menjangkau fasilitas tersebut. Pemerintah juga belum maksimal memberikan fasilitasi untuk pendidikan usia dini khususnya untuk anak usia 0-2 tahun.

Sebenarnya terdapat banyak bantuan untuk mendirikan lembaga PAUD dari Kementerian Pendidikan, tetapi terkendala oleh rumitnya regulasi pencairan dan pertanggungjawaban bantuan hibah maupun bansos, sehingga Pemerintah kabupaten kesulitan untuk mengeksekusi bantuan tersebut.

b) Rendahnya kepedulian masyarakat untuk memasukkan anak ke PAUD

Dari sisi masyarakat, kesadaran untuk menyekolahkan anak usia 0-2 tahun masih rendah, banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak usia 0-2 tahun hanya perlu diasuh oleh orang tua, belum perlu diberikan pengetahuan untuk anak. Oleh karena itu belum ada kepedulian masyarakat untuk mendirikan TPA yang terintegrasi dengan lembaga PAUD (usia 3-4 tahun) yang telah ada.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memasukkan anak usia 0-2 tahun ke lembaga PAUD/ TPA karena peran orang tua belum memahami arti pentingnya pengasuhan anak dan tidak peduli dengan parenting.

2. Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK rendah

Capaian APK pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di tahun 2014 sebesar 73.31%, menandakan bahwa masih ada 27% anak usia sekolah tingkat SMA/ sederajat yang tidak bersekolah, oleh

karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian tersebut.

Masih rendahnya APK SMA/ sederajat disebabkan oleh:

a) Anak tidak melanjutkan dari jenjang sebelumnya/ DO

Anak usia SMA/ sederajat di kabupaten Rembang yang merupakan daerah pertanian dan kelautan, banyak anak yang memilih bekerja, karena mereka termasuk dari keluarga miskin. Mudah-mudahan mencari uang dengan menjadi nelayan menjadikan anak semakin malas untuk bersekolah walaupun sudah ada bantuan beasiswa untuk siswa miskin.

Masalah kemiskinan ternyata bukan merupakan satu-satunya alasan anak tidak sekolah, karena sudah adanya bantuan beasiswa siswa miskin (BSM). Masalah lainnya yaitu anak merasa tidak mampu dalam bidang akademis. Semakin tinggi jenjang pendidikan, pelajaran di sekolah semakin sulit, terlebih anak usia 15-18 tahun sudah bisa mencari nafkah, sehingga mereka lebih malas untuk melanjutkan sekolah. Anak yang malas dikarenakan kurangnya kemampuan di bidang akademik seharusnya diarahkan ke minat maupun bakat, sebaiknya anak bersekolah di sekolah kejuruan, agar anak setelah lulus dari SMK bisa mempunyai keterampilan dan bisa langsung bekerja.

Suasana sekolah yang hanya monoton dalam hal edukatif juga harus dirubah kearah sekolah yang menyenangkan. Proses pembelajaran di sekolah yang kurang menyenangkan juga menyebabkan anak tidak tertarik dengan dunia sekolah. Apalagi disekolah tidak menyediakan sarana ekstrakurikuler yang ada juga belum variatif.

Perkembangan era globalisasi yang sangat terbuka juga ikut mempengaruhi pergaulan anak diluar sekolah, mudah-mudahan akses internet membuat kenakalan remaja meningkat, anak lebih suka bermain dari luar sekolah daripada untuk mengikuti pendidikan di sekolah.

Di Kabupaten Rembang juga masih terdapat budaya lokal yang negatif yakni menganggap bahwa anak perempuan tak

perlu bersekolah tinggi, karena masa depan anak perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Terlebih anak perempuan yang sudah lulus SMP masih banyak yang tidak bersekolah dan dinikahkan, karena orang tua tidak akan menanggung kehidupan anak tersebut dan akan ditanggung oleh suaminya.

- b) Belum semua Kecamatan terdapat sekolah yang diminati Anak yang tidak berkeinginan sekolah menengah atas, seharusnya memilih untuk sekolah di SMK yang akan melatih keterampilan anak dan sampai untuk bekerja. Tetapi ragam jurusan di SMK masih terbatas dan tidak semua kecamatan telah memiliki SMK, sehingga sulit untuk dijangkau. Kondisi Kabupaten Rembang yang agamis juga belum ditangkap untuk mendirikan banyak SMK tapi dengan pendidikan agama/ MAK.

3. Belum ada rute aman/ selamat sekolah

Rute aman sekolah sangat penting untuk ada karena berfungsi menjamin keselamatan anak sekolah saat berangkat sekolah. Kepadatan lalu lintas menumpuk dipagi hari, terlebih jalur pantura yang dilewati kendaraan berat juga menambah kepadatan lalu lintas. Tetapi sampai dengan sekarang belum ada kebijakan dari Kabupaten untuk membuat rute aman/ selamat sekolah, serta kepala dinas terkait yang menangani belum mempunyai komitmen dan menganggarkan pembuatan rute aman sekolah.

#### **4.6. Klaster Perlindungan Khusus**

Masalah yang masih terjadi pada klaster perlindungan khusus antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang belum mendapatkan pelayanan Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah pantai utara pulau Jawa menyebabkan sering dijumpai anak terlantar, anak jalanan, dll yang ada di sepanjang jalan, baik itu hanya lewat ataupun terlantar. Anak yang seharusnya mendapatkan

pengasuhan , pendidikan, kesehatan dan hak-hak yang lain tetapi berada di jalanan. Banyak faktor yang menyebabkan banyak AMPK belum mendapatkan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- Terjadinya penelantaran oleh orang tua/ keluarga tapi bisa juga anak tersebut sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali.
- Kemiskinan menyebabkan anak mencari uang dengan mengemis/ mengamen.
- Gaya hidup ABG, banyak dijumpai anak punk yang hidup di jalanan. Mereka salah memilih teman sehingga terjerumus hidup bebas di jalanan.
- Faktor lingkungan sekitar yang mendukung tumbuh kembang anak, misalnya anak yang hidup dalam lingkungan porstitusi sangat membutuhkan perhatian, karena mereka rentan terjerumus pada masalah yang sama. Lingkungan pertumbuhan anak harus merupakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang anak.
- Keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anak menjadi nakal, karena tidak mempunyai kepedulian akan tumbuh kembang anak terutama dalam pergaulan
- Lunturnya budaya luhur/ norma yang baik yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak, sehingga menyebabkan mental anak menjadi buruk.

## 2. LPAR dan LPKK belum tersedia

Lembaga untuk memberikan pelayanan anak di kabupaten Rembang saat ini hanya untuk melayani anak tanpa pengasuhan sementara (menginap), hanya sebatas memberikan penyuluhan, pendampingan, bimbingan psikologis , dll. Tetapi belum ada tempat untuk menampung anak sementara sebelum anak dipulangkan kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten belum mempunyai komitmen untuk mendirikan lembaga tersebut. Dinas terkait belum melakukan

koordinasi dengan baik untuk segera mendirikan lembaga seperti itu.

3. Belum adanya kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana dengan perspektif kepentingan terbaik bagi anak  
Kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana sangat terkait dengan komitmen Kepala daerah untuk mewujudkannya, namun sektor terkait yang membidangi belum merespon dan menginisiasi peraturan-peraturan di daerah yang berfokus pada pengurangan resiko bencana terutama pada anak.